

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 74
- Akur Nurasa & Dian Aries Mujiburohman, *Buku Ajar Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: 2018)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010)
- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017)
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984)
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010)
- I Gusti Nyoman Guntur, *et.al, Berbenah untuk Masa Depan Indonesia: Menuju Pelayanan Pertanahan yang Inovatif*, (Yogyakarta: STPN Press, 2021)
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan, 2011)
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1998)
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002)
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994)
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013)
- O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, (Jember: Centre for Society Studies, 2006)
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015)
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Soerjono Soekanto, *et.al, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- St Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2017)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1998)

Van Kan, *et. al*, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumi, 1986)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal

Bella Kharisma & I Gede Agus Kurniawan, "Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik sebagai Alat Bukti: Urgensi Harmonisasi Kebijakan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 2 Juli 2022. DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p07.

Dimas Nur Arif Putra Suwandi, "Perlindungan Hukum bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan", Vol. 1, No. 3, Oktober 2018, DOI: 10.20473/mi.v1i3.10183

Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1 2018. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>

I Wayan Jody Bagus Wiguna, "Tinjauan Yuridis terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1 April 2020. DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i01.p07

Krisnawan Andiyanto, *et.al*, "Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p17

Nurul Nadira, "Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang Akan Mulai Dilaksanakan di Badan Pertanahan", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2 November 2019. DOI: <https://doi.org/10.32528/faj.v17i2.2801>

Pandam Nurwulan, "Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah", Vol. 28, No. 1 Januari 2021. DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss1.art9

Saskia Aulia Putri & Irene Eka Sihombing, "Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan yang Jaminannya Batal Menjadi Miliknya Debitur", Vol. 4, No. 3 2022, DOI: <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13855>

Sri Rejeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitur", *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 2 Agustus 2016

Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1 Maret 2016. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>

Hasil Penelitian

- Agus Triono, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Skripsi, Lampung: Program Studi Hukum Universitas Lampung, 2015
- Akur Nurasa, *et. al*, “Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik: Kesiapan, Pelaksanaan, Kelebihan, Kelemahan, Kendala, dan Solusi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Bandung). Laporan Penelitian, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020
- Astri Maya Sari, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Penyampaian dan Penyimpanan Dokumen Pendaftaran Hak Tanggungan Setelah Berlakunya Layanan Hak Tanggungan Elektronik”. Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. Tesis, Surakarta: Program Studi Hukum Universitas Sebelas Maret: Universitas Sebelas Maret, 2003
- Ninuk Dwiastuti, “Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, 2020,
- Rizka Saufika, “Hak Tanggungan Elektronik dalam Kaitannya dengan Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) di Bidang Pertanahan”. Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 686)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349)
- Petunjuk Teknis Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/JUKNIS-400.HR.02/IV/2020 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik

Internet

- Alves Simao L.F.S, *et.al*, “Tinjauan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan”. <https://media.neliti.com/media/publications/26561-ID-tinjauan-mengenai-pelaksanaan-perjanjian-kredit-dengan-hak-tanggungan.pdf>, diakses pada 20 September 2022
- Dee Waluyo, “Beri Layanan Terpadu, ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik”. <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/406718/beri-layanan-terpadu-atr-bpn-luncurkan-layanan-elektronik>, diakses pada 28 Setepmber 2022
- Erni Herawati, ”Kreditur Preferen dalam KUHPerdata”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/19/kreditur-preferen-dalam-kuh-perdata/#:~:text=Secara%20umum%20dapat%20dijelaskan%20bahwa,yang%20memegang%20hak%20jaminan%20kebendaan>, diakses pada 18 September 2022

FJP Law Offices, “Jaminan-Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia”. <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada 17 Oktober 2022

Hilda B Alexander, Layanan Hak Tanggungan Elektronik Tembus 50 Persen”. <https://properti.kompas.com/read/2020/04/18/110000821/layanan-hak-tanggungan-elektronik-tembus-50-persen>, diakses pada 4 Oktober 2022

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html>, diakses pada 28 Oktober 2022

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pengalihan Hak Tagih dengan *Cessie*”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html>, diakses pada 7 November 2022

Legalku, “Hukum Jaminan dalam Indonesia”. <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#:~:text=%22%E2%80%9Cjaminan%E2%80%9D%20merupakan%20terjemahan%20dari,yang%20diterima%20debitur%20terhadap%20kreditornya.%22>, diakses pada 15 Oktober 2022

Suhaiela Bahfein, “Hak Tanggungan Elektronik Resmi Berlaku di Indonesia”. <https://properti.kompas.com/read/2020/07/09/102149221/populer-properti-hak-tanggungan-elektronik-resmi-berlaku-di-indonesia>, diakses pada 27 September 2022

Kamus

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (Indonesia: Kemdikbudristek, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jaminan>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Sucelaw, S.H, Notaris dan PPAT di Kota Ambon, di Kantor Notaris dan PPAT Eddy Sucelaw, S.H, pada tanggal 22 November 2022, pukul 09.00 WIT

Hasil wawancara dengan Bapak Resa Maelissa, S.ST, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Ambon, di Kantor Pertanahan Kota Ambon, pada tanggal 21 September 2022, pukul 09.00 WIT

Hasil wawancara dengan Bapak S. Milian Hanas, Staf Administrasi kredit Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Kota Ambon, secara daring melalui *WhatsApp Call*, pada tanggal 21 November 2022, pukul 19.00 WIT